



Swasembada Pangan sebagai Pilar Strategis Ketahanan Nasional di Indonesia dalam Perspektif Manajemen Pertahanan

Food Self-Sufficiency as a Strategic Pillar of National Resilience in Indonesia from the Perspective of Defense Management

Dwi Agustini Herawati^{1*}, Agung Risdhianto², Edy Saptono³

¹⁻³ Universitas Pertahanan Indonesia

Korespondensi Penulis: Dwiagustini2708@gmail.com

Article History:

Received: Juli 17, 2025;

Revised: Juli 31, 2025;

Accepted: Agustus 11, 2025;

Online Available: Agustus 14, 2025;

Keywords: *food self-sufficiency, food security, food estate, defense management, national resilience.*

Abstract. *Food security is a strategic component in strengthening national resilience, particularly in addressing complex and multidimensional non-military threats. In the Indonesian context, food security is closely linked to social stability, national security, and sustainable development. This study aims to analyze the concept of food self-sufficiency as a pillar of Indonesian national resilience from a defense management perspective. The method used is a qualitative descriptive approach with a literature review approach, utilizing various sources such as academic journals, government policy documents, and reports from related institutions. The results of the study indicate that Indonesia has not yet fully achieved food self-sufficiency, marked by the continued high dependence on imports of strategic food commodities such as wheat, soybeans, and beef. Furthermore, national programs such as the food estate program have not been running optimally due to technical issues, governance, and weak cross-sectoral coordination. The analysis also reveals that the six pillars of food security developed by the FAO—availability, access, utilization, stability, sustainability, and governance—have not been fully integrated effectively into national policies. From a defense management perspective, achieving food self-sufficiency requires a systematic strategy, encompassing long-term planning based on risk analysis, cross-ministerial and private sector organization, integrated implementation supported by modern agricultural technology, and adaptive oversight capable of responding to the dynamics of climate change and global markets. This approach not only strengthens the agricultural sector but also strengthens the nation's defense capacity against non-military threats such as food crises, natural disasters, and economic instability. Therefore, food self-sufficiency must be positioned as an integral part of a sustainable and resilient national defense system, capable of supporting national independence while safeguarding national sovereignty amid increasingly complex global challenges.*

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan bagian strategis dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman non-militer yang bersifat kompleks dan multidimensional. Dalam konteks Indonesia, ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas sosial, keamanan nasional, dan keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep swasembada pangan sebagai pilar ketahanan nasional Indonesia dari perspektif manajemen pertahanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan literature review, memanfaatkan berbagai sumber seperti jurnal akademik, dokumen kebijakan pemerintah, dan laporan institusi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mencapai swasembada pangan, ditandai dengan masih tingginya ketergantungan pada impor bahan pangan strategis seperti gandum, kedelai, dan daging sapi. Selain itu, program nasional seperti food estate belum berjalan optimal akibat permasalahan teknis, tata kelola, dan koordinasi lintas sektor yang lemah. Analisis juga mengungkap bahwa enam pilar ketahanan pangan yang dikembangkan oleh FAO—ketersediaan, akses, pemanfaatan, stabilitas, keberlanjutan, dan tata kelola—belum seluruhnya terintegrasi secara efektif dalam kebijakan nasional. Dari

perspektif manajemen pertahanan, pencapaian swasembada pangan memerlukan strategi yang sistematis, mencakup perencanaan jangka panjang berbasis analisis risiko, pengorganisasian peran lintas kementerian dan sektor swasta, pelaksanaan terintegrasi dengan dukungan teknologi pertanian modern, serta pengawasan adaptif yang mampu merespons dinamika perubahan iklim dan pasar global. Pendekatan ini tidak hanya menguatkan sektor pertanian, tetapi juga memperkuat kapasitas pertahanan negara terhadap ancaman non-militer seperti krisis pangan, bencana alam, dan instabilitas ekonomi. Dengan demikian, swasembada pangan harus diposisikan sebagai bagian integral dari sistem pertahanan nasional yang berkelanjutan dan tangguh, sehingga mampu mendukung kemandirian bangsa sekaligus menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Kata kunci: food estate, ketahanan nasional, ketahanan pangan, manajemen pertahanan, swasembada pangan.

1. PENDAHULUAN

Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi kelangsungan hidup suatu negara, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan multidimensional. Salah satu aspek krusial yang menentukan ketahanan nasional adalah ketahanan pangan. Di Indonesia, isu pangan telah menjadi perhatian strategis karena berkaitan langsung dengan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, upaya mewujudkan swasembada pangan bukan semata merupakan isu sektoral di bidang pertanian, melainkan bagian integral dari strategi pertahanan nasional secara menyeluruh.

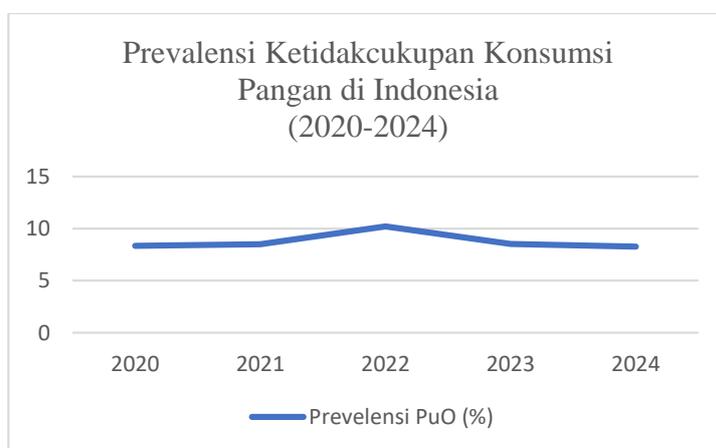
Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi pertanian yang melimpah. Namun, kondisi ini belum menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Fenomena ketergantungan terhadap impor beras dalam beberapa dekade terakhir menjadi ironi tersendiri, mengingat Indonesia pernah meraih status swasembada beras pada tahun 1984 dan mendapat penghargaan dari FAO (Sastrosupadi, 2019). Namun sejak tahun 2000, Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras secara konsisten, dengan jumlah impor yang terus meningkat setiap tahunnya (Hasanah, 2022).

Salasa (2021) menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan pilar (*availability*), tetapi juga mencakup aksesibilitas (*accessibility*) dan keterjangkauan (*affordability*). Lebih lanjut, FAO sebagai organisasi pangan dunia menambahkan tiga pilar tambahan dalam kerangka ketahanan pangan global, yaitu stabilitas (*stability*), agensi (*agency*), dan keberlanjutan (*sustainability*), sehingga totalnya menjadi enam pilar (Azhima et al., 2023). Pencapaian keenam pilar ini di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang serius. Perubahan iklim telah berdampak besar pada pola tanam dan produktivitas pertanian. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern menyebabkan banyak petani belum mampu meningkatkan hasil panen secara optimal. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman juga mengurangi kapasitas produksi pangan nasional. Ditambah lagi, ketimpangan distribusi pangan antarwilayah masih tinggi, terutama di kawasan

timur Indonesia, sehingga memengaruhi stabilitas dan akses masyarakat terhadap pangan (Rasman et al., 2023).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) di Indonesia mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah grafik garis yang menunjukkan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Grafik ini menunjukkan fluktuasi tingkat kekurangan konsumsi pangan selama lima tahun terakhir, dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 (10,21%) sebelum menurun kembali.

Grafik 1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020-2024)

Pada tahun 2020, PoU tercatat sebesar 8,34%, kemudian meningkat menjadi 8,49% pada 2021, dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan angka 10,21%. Namun, pada tahun 2023, angka ini menurun menjadi 8,53%, dan diperkirakan mencapai 8,27% pada 2024. Jika dilihat berdasarkan wilayah, terdapat disparitas yang signifikan dalam angka PoU antarprovinsi. Misalnya, pada tahun 2023, Papua mencatatkan angka PoU tertinggi sebesar 35,63%, diikuti oleh Maluku (30,27%) dan Maluku Utara (29,56%). Sementara itu, provinsi dengan angka PoU terendah adalah Nusa Tenggara Barat (2,17%), DKI Jakarta (2,57%), dan Banten (2,87%) (BPS, 2020-2024). Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional belum merata dan sangat rentan terhadap tekanan struktural maupun geografis.

Sebagai langkah strategis, pemerintah mengembangkan program *food estate* sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas pangan melalui kawasan pertanian skala besar yang terintegrasi. Meski secara konsep menjanjikan, implementasi *food estate* menuai kritik. Banyak kajian menyebutkan bahwa program ini masih lemah dalam aspek perencanaan, partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor (Rasman et al., 2023). Dampak ekologis seperti deforestasi dan degradasi ekosistem juga menjadi isu serius yang

harus ditangani (Hamdiah et al., 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya swasembada pangan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan teknis semata. Diperlukan tata kelola terpadu yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor, dengan perencanaan strategis dan sistem pengawasan adaptif. Di sinilah pentingnya pendekatan manajemen pertahanan, sebuah kerangka yang menempatkan isu pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan negara secara holistik dan multidimensi.

Paradigma pertahanan nasional telah mengalami pergeseran dari pendekatan tradisional yang berfokus pada ancaman militer semata menuju pendekatan pertahanan non-militer yang meliputi ancaman krisis energi, perubahan iklim, dan kerentanan pasokan pangan menjadi faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi stabilitas negara. Penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai salah satu aktor utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional mencerminkan pergeseran paradigma dari pertahanan tradisional menuju pertahanan menyeluruh (Sarjito, 2022). Oleh karena itu, diperlukan analisis akademik untuk memahami bagaimana manajemen pertahanan dapat memperkuat pencapaian swasembada pangan sebagai bagian dari sistem ketahanan nasional yang berkelanjutan dan resilien.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka (*literature review*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterkaitan antara konsep swasembada pangan dan ketahanan nasional dalam perspektif manajemen pertahanan. Data diperoleh dari berbagai sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, undang-undang, laporan resmi pemerintah, dan dokumen organisasi internasional yang relevan (Creswell, 2018). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dan sintesis tematik, dengan langkah-langkah berupa identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi temuan literatur untuk menggambarkan keterkaitan antara swasembada pangan dan ketahanan nasional di Indonesia.

3. HASIL

3.1 Kondisi Ketahanan Pangan di Indonesia

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, terutama akibat tingginya ketergantungan terhadap impor pangan pokok. Penelitian dari Yunitasari (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Indonesia mencapai rekor impor beras tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 2,2 juta ton. Fenomena ini menjadi indikator

utama bahwa kapasitas produksi dalam negeri masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Ketergantungan yang tinggi ini berimplikasi langsung terhadap ketahanan nasional, mengingat fluktuasi harga pangan di pasar global dan gangguan rantai pasok internasional sehingga berimplikasi langsung pada stabilitas nasional.

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri juga memperbesar kerentanan terhadap ancaman non-militer, seperti embargo pangan, konflik geopolitik, serta instabilitas ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, ketahanan pangan tidak bisa lagi diposisikan semata sebagai isu pertanian atau ekonomi, melainkan menjadi bagian strategis dari upaya menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dan strategi nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama demi memperkuat fondasi ketahanan nasional. Untuk mendukung urgensi reformulasi kebijakan yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional, penting untuk melihat bagaimana posisi Indonesia dalam ketahanan pangan secara global. Berikut adalah data Indeks Ketahanan Pangan (GFSI) di Indonesia yang merekam tren peringkat dan skor Indonesia selama satu dekade terakhir:

Grafik 2. Indeks Ketahanan Pangan (GFSI) Indonesia, 2012-2022



Sumber: Economist Impact (CNBC Indonesia)

Laporan Global Food Security Index (GFSI) yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit memperlihatkan bahwa peringkat ketahanan pangan Indonesia selama rentang waktu 2012 hingga 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif bahkan cenderung stagnan. Pada tahun 2022, Indonesia berada di posisi ke-69 dari 113 negara dengan skor 59,2, angka ini menempatkan Indonesia di bawah negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Peringkat tersebut mencerminkan masih lemahnya aspek-aspek penting seperti aksesibilitas, ketersediaan, mutu dan keamanan pangan, serta kapasitas sistem pangan dalam menghadapi krisis.

Situasi ini menunjukkan bahwa tingginya angka impor pangan bukanlah persoalan insidental, melainkan mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem produksi dan distribusi pangan nasional. Oleh karena itu, hasil penilaian GFSI ini seharusnya mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih berkelanjutan, termasuk penguatan infrastruktur pertanian, peningkatan variasi komoditas pangan, dan stabilisasi harga guna membangun ketahanan nasional yang lebih kokoh.

3.2 Evaluasi Keterbatasan Implementasi Program Swasembada: Studi Kasus *Food Estate*

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp139 triliun pada 2025 untuk mendukung program swasembada pangan, jumlah yang menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alokasi anggaran ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berikut adalah alokasi anggaran untuk mendukung Swasembada pangan di Tahun 2025.

Grafik 3. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan, 2025



Sumber: Katadata (2024)

Besarnya alokasi anggaran ini membuka peluang strategis untuk memperkuat berbagai aspek dalam sistem pangan nasional, mulai dari peningkatan infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi, hingga penguatan kelembagaan petani. Namun, keberhasilan penggunaan anggaran tersebut sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang berbasis data serta pelaksanaan yang partisipatif dan responsif terhadap kondisi sosial-ekologis di lapangan. Salah satu bentuk konkret dari implementasi kebijakan swasembada pangan yang mendapat dukungan anggaran besar ini adalah Program *Food Estate*.

Program *Food Estate* merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pangan terintegrasi dalam skala besar. Sebagai proyek pertanian skala besar, *Food Estate*

diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan produksi pangan pokok secara signifikan dan merata di berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional 2020–2024 yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan pokok, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat cadangan pangan nasional. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai keterbatasan mendasar baik dari aspek teknis, sosial, hingga lingkungan.

Salah satu studi mendalam mengenai keterbatasan Program *Food Estate* dilakukan oleh Rasman et al. (2023), yang meneliti implementasi kebijakan ini di Kalimantan Tengah. Studi ini mengungkap bahwa kebijakan *Food Estate* yang berorientasi pada proyek pertanian skala besar sering kali tidak mempertimbangkan kesesuaian agroekologis lahan. Pengembangan dilakukan di atas lahan gambut yang tidak cocok untuk komoditas seperti padi dan jagung, sehingga menimbulkan kegagalan panen dan degradasi lingkungan. Rasman et al. menegaskan bahwa kebijakan ini memerlukan pendekatan yang berbasis data spasial, analisis daya dukung lahan, dan pelibatan masyarakat lokal agar dapat berkelanjutan.

Penelitian lain oleh (Hamdiah et al., 2023) memberikan kritik tajam terhadap model pelaksanaan Program *Food Estate* yang mengedepankan pendekatan teknokratis dan *top-down*. Studi ini menemukan bahwa kebijakan ini tidak hanya kurang melibatkan masyarakat lokal, tetapi juga menimbulkan konflik agraria akibat ketidakjelasan status lahan dan minimnya konsultasi publik. Dampak lingkungan seperti deforestasi dan hilangnya fungsi ekologis kawasan hutan menjadi konsekuensi nyata dari buruknya perencanaan. Peneliti juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan penghormatan terhadap kearifan lokal dalam merancang kebijakan pangan yang berkelanjutan.

Dalam konteks evaluasi program ketahanan pangan berbasis komunitas, (Wismaya et al., 2017) melakukan studi pada Lumbung Pangan Masyarakat di Subak Seronggo, Bali, sebagai studi pembanding. Walaupun bukan bagian dari *Food Estate*, studi ini menyoroti bahwa keberhasilan ketahanan pangan lokal sangat ditentukan oleh sinergi kelembagaan, kontinuitas pendampingan, dan keberdayaan petani. Dalam perbandingan dengan *Food Estate*, studi ini menunjukkan bahwa program berskala nasional sering kali gagal karena tidak membangun fondasi sosial yang kuat. Hasil penelitian ini menjadi referensi penting bahwa kebijakan ketahanan pangan tidak cukup jika hanya berbasis target produksi tanpa mengindahkan aspek sosial dan budaya.

Program *Food Estate* sebagai strategi swasembada pangan mengalami berbagai kendala struktural yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah pemilihan lahan yang

tidak sesuai secara agroekologis, yang berdampak pada kegagalan panen dan degradasi lingkungan, seperti yang tercatat dalam studi kasus di Kalimantan Tengah. Proyek ini dijalankan tanpa mempertimbangkan karakteristik tanah gambut yang rentan, sehingga menyebabkan deforestasi dan hilangnya fungsi ekologis. Selain itu, pendekatan yang terlalu teknokratis dan sentralistik mengabaikan partisipasi aktif masyarakat lokal, memicu konflik agraria dan lemahnya rasa memiliki terhadap program. Pola *top-down* ini juga memperburuk efektivitas implementasi, karena masyarakat yang terdampak langsung tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Secara sistemik, hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam integrasi perencanaan spasial, sosial, dan kelembagaan yang seharusnya menjadi landasan bagi proyek swasembada berskala nasional.

3.3 Pilar Ketahanan Pangan di Indonesia

Secara global, FAO mengembangkan enam pilar utama ketahanan pangan yang menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan inklusif. Falah & Normasari (2024) menganalisis bahwa kebijakan pangan Indonesia selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada dua pilar awal, yakni ketersediaan dan aksesibilitas, sementara aspek agensi, stabilitas, dan keberlanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan nasional. Padahal, ketimpangan akses dan kerentanan sistem pangan dapat berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Berikut adalah tabel analisis implementasi pilar FAO di Indonesia:

Tabel 1. Analisis Implementasi pilar FAO di Indonesia

Pilar FAO	Implementasi di Indonesia	Keterangan Tambahan
Ketersediaan (Availability)	Sudah menjadi fokus utama dalam program pangan nasional	Ditunjukkan melalui program <i>Food Estate</i> dan peningkatan produksi pangan
Aksesibilitas (Accessibilty)	Relatif tercapai di wilayah perkotaan, namun belum merata di daerah 3T	Keterbatasan infrastruktur dan daya beli menjadi kendala
Pemanfaatan (Utilization)	Masih terbatas pada aspek kuantitas, belum menyeluruh pada gizi dan diversifikasi pangan	Program gizi masyarakat belum terintegrasi dengan produksi dan konsumsi pangan lokal
Stabilitas (Stability)	Rentan akibat ketergantungan impor dan fluktuasi iklim	Sistem cadangan pangan nasional belum kuat, distribusi terganggu saat krisis
Agensi (Agency)	Belum optimal, masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan kebijakan pangan	Kebijakan cenderung <i>top-down</i> , tidak berbasis pada kearifan lokal
Keberlanjutan (Sustainability)	Minim perhatian terhadap aspek lingkungan dan ekosistem dalam pengembangan pangan	Kasus <i>Food Estate</i> menunjukkan pengabaian pada keberlanjutan ekologis (alih fungsi lahan, deforestasi)

Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Analisis ini memperlihatkan bahwa kebijakan pangan nasional masih menitikberatkan pada aspek produksi, dengan mengabaikan dimensi sosial, partisipatif, dan lingkungan. Pilar-pilar seperti agensi dan keberlanjutan sangat lemah, sementara stabilitas juga terganggu oleh

ketergantungan terhadap pangan impor dan belum kuatnya sistem cadangan nasional. Untuk membangun ketahanan pangan yang tangguh, kebijakan perlu mengadopsi pendekatan holistik, berbasis wilayah, dan berorientasi jangka panjang.

4. DISKUSI

4.1 Ketahanan Pangan dalam Perspektif Pertahanan Nasional

Ketahanan pangan merupakan elemen strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung sistem pertahanan negara secara menyeluruh. Dalam kerangka Sistem Pertahanan Semesta (Sishankamrata), seluruh komponen bangsa baik militer maupun sipil memiliki peran dalam menghadapi ancaman terhadap ketersediaan dan akses pangan, yang dapat memicu konflik sosial, instabilitas politik, hingga disintegrasi nasional. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan tidak dapat dibebankan semata pada sektor pertanian, melainkan harus menjadi agenda lintas sektor, termasuk institusi pertahanan dan keamanan, terutama dalam perlindungan infrastruktur pangan, distribusi logistik, serta mitigasi risiko terhadap gangguan domestik maupun global.

Dalam paradigma pertahanan modern, kebijakan ketahanan pangan perlu dirancang secara adaptif, sinergis, dan berbasis kewilayahan. Pendekatan ini mencakup perencanaan yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekologis lokal, pelibatan aktif masyarakat, serta pemanfaatan teknologi strategis untuk mendukung produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai isu produksi, tetapi sebagai instrumen pertahanan non-militer yang vital dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat daya tahan nasional, serta membangun solidaritas antardaerah dalam menghadapi ancaman multidimensional, baik tradisional maupun non-tradisional.

4.2 Manajemen Pertahanan Non-Militer dalam Mendukung Swasembada Pangan

Swasembada pangan merupakan salah satu bentuk konkret upaya membangun ketahanan nasional dari aspek non-militer. Dalam kerangka Astagatra yang mencakup Trigatra (geografi, demografi, dan sumber daya alam) serta Saptagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum), ketahanan pangan masuk dalam gatra sumber daya alam dan ekonomi yang menopang gatra pertahanan dan keamanan. Sebagaimana dijelaskan oleh Biwilfa (2025), negara dengan tingkat kemandirian pangan yang tinggi memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap berbagai bentuk tekanan eksternal. Krisis pangan global, konflik perdagangan, atau instabilitas politik internasional tidak akan berdampak

signifikan jika negara memiliki sistem pangan yang mandiri dan tangguh. Oleh karena itu, upaya mewujudkan swasembada pangan harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan pertahanan nasional secara menyeluruh dan terintegrasi.

Dalam perspektif manajemen pertahanan, swasembada pangan perlu dirancang berdasarkan prinsip perencanaan terpadu, pengorganisasian lintas sektor, pelaksanaan program strategis, serta pengawasan yang adaptif. Perencanaan mencakup pemetaan wilayah produksi prioritas dan penyusunan skenario darurat terhadap potensi ancaman pangan. Pengorganisasian melibatkan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Bapanas, TNI, dan pemerintah daerah. Selain itu, pendekatan ini menekankan integrasi teknologi pertahanan seperti citra satelit dan sistem logistik nasional untuk mendukung distribusi dan produksi pangan, terutama di wilayah rawan dan perbatasan. Dengan demikian, swasembada pangan menjadi bagian integral dari strategi ketahanan nasional yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kedaulatan negara.

4.3 Strategi Integratif Menuju Ketahanan Nasional

Strategi nasional yang integratif perlu dirancang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menyeluruh, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan sektor pertanian, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif sektor pertahanan, infrastruktur, logistik, teknologi, dan pendidikan dalam merancang kebijakan dan program yang adaptif terhadap ancaman strategis. Reformasi kebijakan pangan harus diarahkan untuk tidak hanya meningkatkan kuantitas produksi, tetapi juga menjamin kualitas, distribusi merata, keterjangkauan harga, serta keamanan dan keberlanjutan sistem pangan secara keseluruhan.

Dalam ranah pengambilan kebijakan, keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, komunitas petani, akademisi, dan sektor swasta menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem pangan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pendanaan yang memadai, serta pengawasan berbasis data dan teknologi menjadi elemen penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan tepat sasaran. Menurut Rusmawati et al. (2023) dan Falah & Normasari (2024), pendekatan integratif yang memadukan kebijakan berbasis bukti, pemanfaatan teknologi pertanian presisi, serta penghargaan terhadap kearifan lokal dan dinamika sosial budaya akan memperkuat resiliensi pangan Indonesia. Dengan demikian, swasembada pangan tidak hanya berfungsi sebagai indikator keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga sebagai pilar utama dalam memperkuat ketahanan nasional yang tangguh, adaptif, dan berdaulat di tengah kompleksitas ancaman global.

5. KESIMPULAN

Swasembada pangan merupakan salah satu pilar strategis dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang bersifat non-militer seperti krisis iklim, disrupsi rantai pasok global, dan ketegangan geopolitik. Ketergantungan terhadap impor pangan yang masih tinggi menjadi indikator lemahnya kemandirian pangan nasional, yang jika tidak segera ditangani, dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Analisis terhadap implementasi program *Food Estate* menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan pangan sering kali disebabkan oleh lemahnya perencanaan, pendekatan teknokratis yang tidak kontekstual, dan minimnya pelibatan masyarakat. Di sisi lain, enam pilar ketahanan pangan global menurut FAO belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kebijakan nasional, terutama pada aspek stabilitas, agensi, dan keberlanjutan.

Dalam perspektif manajemen pertahanan, swasembada pangan harus dirancang sebagai bagian dari strategi pertahanan non-militer dengan prinsip perencanaan terpadu, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi pertahanan untuk mendukung produksi, distribusi, dan pengawasan pangan nasional. Ketahanan pangan bukan hanya tentang mencukupi konsumsi dalam negeri, tetapi juga sebagai komponen kesiapsiagaan nasional menghadapi krisis yang bersifat multidimensi. Dengan demikian, swasembada pangan bukan sekadar isu pertanian, tetapi merupakan instrumen penting dalam mendukung sistem pertahanan negara yang adaptif dan tangguh, sebagaimana tertuang dalam kerangka Astagatra dan pendekatan pertahanan semesta.

6. SARAN

1. **Pemerintah** perlu menyusun kebijakan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan strategi pertahanan nasional, dengan menempatkan swasembada pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer.
2. **Kementerian Pertahanan**, bersama dengan Kementerian Pertanian dan Bapanas, didorong untuk meningkatkan sinergi melalui pemanfaatan teknologi pertahanan seperti penginderaan jauh, sistem logistik nasional, dan pemetaan wilayah pangan strategis guna memperkuat produksi dan distribusi pangan nasional.
3. **Evaluasi dan perbaikan program *food estate*** harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis spasial, sosial, dan ekologis yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, akademisi, serta pemerintah daerah.

4. **Integrasi enam pilar ketahanan pangan FAO** perlu diterapkan secara nyata dalam kebijakan nasional dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, agensi, dan stabilitas sebagai respons terhadap dinamika global.
5. **Pembangunan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia** dalam manajemen pangan dan pertahanan perlu ditingkatkan melalui pelatihan lintas sektor, penguatan riset, dan penyusunan kebijakan berbasis data untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berdaulat.

DAFTAR REFERENSI

- Azhima, M. F., Deniar, S. M., Nugraha, T. C., & Salahudin. (2023). Six pillars of global food security in Indonesia: A systemic literature review. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25(3), 419–429.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, 2020–2024 (Statistik Ketahanan Pangan). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan.html>
- Biwilfa, N. (2025). Mewujudkan kemampuan ketahanan pangan yang kuat untuk mendukung perekonomian nasional. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- CNBC Indonesia. (2023, Januari 26). Soal ketahanan pangan, Indonesia berada di urutan 69 dunia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230126081433-128-408319/soal-ketahanan-pangan-indonesia-berada-di-urutan-69-dunia>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed methods procedures. In *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Falah, I., & Normasari, N. M. E. (2024). Implementasi metode simulasi dalam mendukung ketahanan pangan: Systematic literature review.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2013). The state of food insecurity in the world 2013: The multiple dimensions of food security. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13032228>
- Hamdiah, A. N., Tjahjana, M. C., & Aliansyah, A. B. (2023). Analisis ekonomi politik: Studi kasus proyek food estate menuju ketahanan pangan di Indonesia. *Jurnal Suara Politik*, 2(2), 1–7.
- Hasanah, L. (2022). Analisis faktor-faktor pengaruh terjadinya impor beras di Indonesia setelah swasembada pangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 55–70.
- Katadata. (2024, Mei 28). Anggaran swasembada pangan 2025 capai Rp139 triliun. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/67230941b8eb8/anggaran-swasembada-pangan-2025-capai-rp139-triliun>

- Rasman, A., Theresia, E. S., & Aginda, M. F. (2023). Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. *Journal of Tropical Agriculture Sciences*, 1(1), 36–68.
- Rusmawati, E., Hartono, D., & Aritenang, A. F. (2023). Food security in Indonesia: The role of social capital. *Development Studies Research*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2169732>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48.
- Sarjito, A. (2022). The role of the Ministry of Defense in ensuring food security for state defense. *Journal of Governance*, 7(3).
- Sastrosupadi, A. (2019). Ketahanan pangan dan beberapa aspeknya. *Jurnal Buana Sains*, 19(2), 47–52.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2012). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100>
- Wismaya, I. G. D., Sutjipta, I. N., & Sudarta, W. (2017). Evaluasi penerapan program lumbung pangan masyarakat di Subak Seronggo Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)*, 6(2), 270–279. <https://doi.org/10.24843/jaa.2017.v06.i02.p10>
- Yunitasari, D. (2025). Dampak dan tantangan penghentian impor beras melalui akselerasi swasembada pangan nasional. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 30–42.